

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG  
GUGATAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN  
SENGKETA HAK MILIK**

**(Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Inayatur Rahman Kapa

NIM. C71214079



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inayatur Rahman Kapa

NIM : C71214079

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

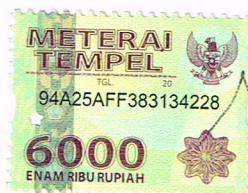
Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengket Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018  
Saya yang menyatakan,



Handwritten signature of Inayatur Rahman Kapa.

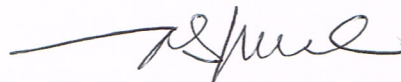
Inayatur Rahman Kapa  
NIM. C71214079

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)” yang ditulis oleh Inayatur Rahman Kapa, NIM C71214079 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inayatur Rahman Kapa NIM C71214079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunau Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



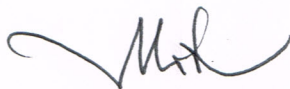
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.  
NIP. 197211061996031001

Penguji II



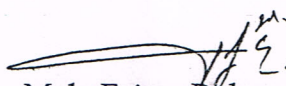
Dr. Ita Musarrofa, S.HI., M.Ag.  
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI  
NUP. 201603310

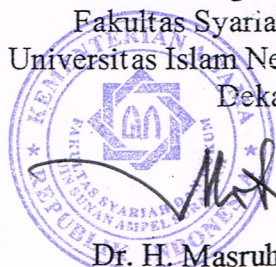
Surabaya, 7 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INAYATUR RAHMAN KAPA  
NIM : C71214079  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : nhaya.kapa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN SENGKETA HAK MILIK (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)

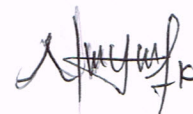
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2018

Penulis



(Inayatullah Rahman Kapa)



















para pencari keadilan, khususnya bagi yang beragama Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam, seperti masalah gugat cerai, warisan, wasiat dan lain sebagainya.

Di Pengadilan Agama Ende terdapat putusan perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed yang berisi kumulasi sengketa, yaitu kumulasi antara sengketa waris yang merupakan pokok gugatan yang diajukan oleh para penggugat dan sengketa hak milik yang muncul kemudian dalam proses persidangan.

Pokok gugatan dalam perkara tersebut adalah Para Penggugat ingin melakukan pembagian waris atas harta peninggalan almarhum bapak mereka yang berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 486 m<sup>2</sup>, keinginan mereka tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terhalang karena tanah tersebut sedang berada dalam kekuasaan para tergugat. Para tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti berupa sertifikat hak milik. Fakta inilah yang kemudian memunculkan sengketa hak milik dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA. Ed tersebut.

Dalam memutuskan gugatan yang di dalamnya terjadi sengketa hak milik, hakim seharusnya menerapkan pasal 50 undang-undang no 3 tahun 2016 yang menyatakan apabila terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 (dalam undang-undang yang sama), khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang menjadi objek









sendiri atau perkara tersebut mempunyai akibat hukum yang saling terikat.<sup>9</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Edwin Nehemia Wuisan dengan judul *Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa*. Dalam skripsinya, penulis memberi kesimpulan kedudukan tanah warisan dalam sengketa atau perkara di Pengadilan apabila dilihat dari segi kepastian hukum, pengadilan perlu memberikan putusan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut. Karena tanah yang dalam status sengketa sangat rentan terjadinya permasalahan-permasalahan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Haris Shofiudin dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan PA Pemakasan Nomor 924/Pdt.G/2010/PA. Pmk Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 312/Pdt.G/2011/PTA. Sby.* Dalam skripsinya, penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama memberikan penjelasan bahwa sengketa hak milik selain sengketa dimaksud dalam pasal 49 yang meliputi sengketa perkawinan, wasiat, hibah dan lain sebagainya, hal itu bisa diperkarakan di hadapan majelis hakim

---

<sup>9</sup> Roni Satriya Cahyadi, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang Di Dalamnya terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan dengan Asas Personalitas Keislaman; Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/ma/2015", (Skripsi -- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016), 65

<sup>10</sup> Edwin Nehemia Wuisan, "Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris yang Dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa", *lewat Lex Crime* Vol. V No. 6 (Agustus, 2016) : 69











- 2) Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*
- 3) Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*
- 4) M. Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata (Edisi Kedua)*
- 5) Roihan A. Rasyid *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*
- 6) Abdul Manan *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*
- 7) R. Soeroso *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata (Bagian 1 Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan)*
- 8) M. Yahya Harahap *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Edisi Kedua)*
- 9) Aden Rosadi *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*
- 10) Ahmad Mujahidin *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama*
- 11) Kompilasi Hukum Islam
- 12) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama..

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan





BAB II : Merupakan kerangka teoritik yang memuat teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian berupa : kompetensi absolut pengadilan agama, penyelesaian sengketa waris, penyelesaian sengketa hak milik, penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik.

BAB III : Menjelaskan hasil penelitian tentang penyelesaian perkara yang meliputi gambaran sekilas tentang Pengadilan Agama Ende, deskripsi putusan Hakim, pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan gugatan sengketa pembagian waris dan sengketa hak milik (Nomor 52/Pdt.G/PA.Ed).

BAB IV : Bab ini berisi analisis tentang wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris dan sengketa hak milik berdasarkan kompetensi absolut, analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris dan sengketa hak milik dalam putusan nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed serta kesesuaian putusan tersebut dengan yuridis/ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, salah satu bidang hukum “tertentu” yang dimaksud ke dalam kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ialah mengadili perkara kewarisan. Mengetahui luas jangkauan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara waris sangatlah penting. Jangkauan kewenangan tersebut meliputi :

1. Asas Personal Keislaman

Seperti yang sudah sering disinggung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 49 ayat (1) *jo* Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga, telah ditetapkan salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personal keislaman. Dengan mengaitka asas personal ke-Islaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b *jo* Penjelasan umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personal ke-Islaman dalam bidang perdata waris meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Dengan begitu luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang







































































dalam penguasaan para Tergugat dengan cara tanah tersebut telah di sertifikatkan oleh Terugat I melalui Turut Tergugat dan Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I. Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak-pihak di dalam perkara bukan ahli waris dari almarhum P, tetap para Tergugat adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pewaris dan ahli waris atau antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan kewarisan sama sekali. Dengan demikian sengketa tersebut bukanlah sengketa kewarisan, karena ciri khas dari perkara “waris” yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Perkara ini adalah sengketa milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga, bukan sengketa milik di antara para ahli waris dalam perkara kewarisan seperti yang dimaksud oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan para Penggugat adalah bukan perkara waris tetapi perkara sengketa hak milik. Tanah tersebut bukan merupakan

harta warisan dari almarhum P melainkan merupakan tanah kepemilikan dari Tergugat I sebagaimana bukti kepemilikan surat Tergugat I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tahun 2004 yang sebelumnya merupakan harta peninggalan ayah kandung Tergugat I, dengan demikian pokok perkara ini adalah mengenai sengketa hak milik bukan sengketa waris, oleh karenanya bukan kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya dan terhadap hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi : *“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.”* Dengan demikian Pengadilan Agama Ende patut untuk menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara tersebut, dan juga Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan para Penggugat bukan merupakan gugatan harta warisan melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimohonkan para Penggugat dalam petitum gugatannya. Hal tersebut merupakan kompetensi absolut

















*persona*, gugatan kabur dan kekurangan para pihak, gugatan lampau waktu (*verjaring*) dan gugatan *obscuur libel*, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan masing-masing :

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangan dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum para Tergugat.
2. Memerintahkan kepada para Penggugat/Kuasa Hukum para Penggugat dan para Tergugat/Kuasa Hukum para Tergugat untuk meneruskan perkaranya di depa sidang Pengadilan Agama Ende.
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai para Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat materi dalam eksepsi para tergugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat *error in persona* sangat berkaitan dengan eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya. Dan oleh karena Majelis Hakim telah menolak eksepsi para tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1438 Hijriyah maka

terhadap eksepsi para Tergugat mengenai *error in persona* akan dipertimbangkan kembali dalam materi perkara. Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kabur dan kekurangan para pihak, Majelis Hakim berpendapat materi dalam eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan waris dari para ahli waris dalam sistem kewarisan Islam yang menjadi rujukan Pengadilan Agama dalam memutuskan gugatan waris, tidaklah menjadi lampau waktu (*verjaring*) atau kadaluwarsa hanya karena tidak digugat dalam kurun waktu tertentu, dan meskipun objek sengketa dalam perkara *a quo* didalilkan telah terbit Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam eksepsi Tergugat, namun terhadap sertifikat dimaksud pengadilan bisa menyatakan tidak mempunyai kekuatan sepanjang para Penggugat dapat membuktikan asal usul kepemilikan objek sengketa, oleh karena itu sepanjang objek sengketa (harta warisan) belum pernah dibagi, baik dibagi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuasaan hukum tetap, dibagi secara damai berdasarkan pembagian harta waris Islam ataupun dibagi secara kekeluargaan, maka ahli waris yang merasa dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan waris. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1960 tanggal 9

Maret 1960. Dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat yang lampau waktu (*verjaring*) atau kadaluwarsa harus ditolak.

Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para Penggugat), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya yang digugat oleh para Penggugat adalah objek sengketa (yang didalilkan sebagai harta peninggalan Pewaris) yang sedang dalam penguasaan pihak lain dalam hal ini para Tergugat. Gugatan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat, merupakan bagian dari kewenangan pengadilan agama sepanjang tidak diajukan secara terpisah, melainkan harus bersama-sama dengan gugatan pokok yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan atas kewenangan pengadilan agama sebagaimana dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dalam perkara *a quo* yang menjadi gugatan pokok dari para Penggugat adalah kewarisan.

Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kedua belah pihak telah pula melakukan proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Irwahidah M.S., S.Ag., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2017 bahwa mediasi atas perkara Nomor 52//Pdt.G/2016//PA. Ed gagal mencapai kesepakatan.



Untuk membuktikan dalil-dalilnya para Penggugat dan para Tergugat sudah mengajukan alat bukti baik berupa saksi-saksi ataupun surat-surat.

Dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Masih ada harta peninggalan almarhum P yang belum dicantumkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Ahli waris atau anak dari almarhum P yang bernama S telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan yang tinggal di Jawa, istri dan dua orang anak perempuan dari S tersebut tidak dicantumkan atau menjadikan pihak dalam perkara *a quo*.

Terhadap fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara warisan seluruh harta peninggalan Pewaris harus diajukan/disebutkan dalam satu gugatan, dan tidak dibenarkan hanya mengajukan gugatan sebagian dari harta peninggalan Pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 621/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “*di dalam gugatan harta warisan harus menyebutkan seluruh harta warisan peninggalan pewaris, baik yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi*”. Dengan tidak diajukannya seluruh harta warisan Pewaris dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur. S merupakan salah satu ahli waris dari almarhum P bersama-sama saudaranya sebagaimana

disebutkan dalam gugatan Para Penggugat, namun telah meninggal dunia tahun 2013 atau setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun demikian bagian harta waris dari S semestinya diwariskan kembali kepada ahli warisnya dalam hal ini istrinya dan kedua anak perempuannya. Jika diperhatikan surat gugatan para Penggugat, maka diketahui bahwa para Penggugat hanya mmenjelaskan bahwa S telah meninggal dunia, namun tidak menjelaskan apakah S meninggalkan ahli waris serta tidak melibatkan ahli waris tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dilibatkannya semua ahli waris dalam gugatan serta pembagian warisan sangatlah penting dalam suatu gugatan waris, karena bila tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam gugatan serta pembagian harta warisan, sangat memungkinkan adanya penyelundupan hukum serta berakibat diabaikannya ahli waris lainnya yang juga memiliki hak sama dengan obyek gugatan (harta warisan).

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2403/K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, begitupun dengan Yurisprudensi Mangkamah Agung RI Nomor 573/K/SIP/1996 tanggal 11 Juli 1997, yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan maka gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat















terpisah dan menjadi bagian dari pokok perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

2. Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan para penggugat *error in persona* dalam bentuk *prulium litis consortium* atau kekurangan pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 kaidah hukumnya menyatakan “di dalam gugatan harta warisan harus menyebutkan seluruh harta warisan peinggalan pewaris, baik yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi”. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2430/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Dalam perkara nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed para Penggugat terbukti tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan pewaris dalam gugatannya. Fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa peninggalan almarhum P (pewaris) dan istrinya tidak hanya berupa tanah objek sengketa, melainkan masih ada tanah, rumah dan bangunan lain yang terletak di kelurahan Bokasape dan tanah yang terletak di lau Lowo yang juga belum dibagi waris berdasarkan putusan pengadilan. Para Penggugat juga terbukti tidak mencantumkan seluruh ahli waris dari almarhum P. Fakta hukum tersebut berdasarkan pernyataan saksi-saksi yang mengatakan salah









pasal 50 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 undang-undang yang sama, maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu. Sedangkan majelis hakim yang menangani perkara nomor 52/Pdt.G/PA.Ed dalam memutuskan perkara tidaklah memasukkan fakta hukum ini (sengketa hak milik) dalam pertimbangan hukumnya.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diproses lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan apabila sengketa hak milik tersebut terjadi antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, selama sengketa hak milik itu tidak diajukan secara terpisah dan menjadi bagian dari pokok perkara.

Pada penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 dikatakan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Peradilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lain.







- 3) Gugatan para Penggugat *error in persona* (pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru),
  - 4) Gugatan para Penggugat kabur dan kekurangan pihak,
  - 5) Gugatan para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*),
  - 6) Gugatan para Penggugat *obscure libel* (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan).
- b. Majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan kesaksian para saksi ditemukan fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah *error in persona* dalam bentuk *prulium litis consortium* atau kurang pihak.
3. Putusan No. 25/Pdt.G/2016/PA.Ed tidak sesuai dengan ketentuan hukum UU No. 3 Tahun 2006 karena dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak memasukkan permasalahan sengketa hak milik dalam pertimbangan hukumnya.

## B. Saran

1. Majelis Hakim dalam mengambil sebuah keputusan haruslah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada. Baik fakta hukum tersebut sudah tercantum dalam gugatan ataupun fakta hukum yang ditemukan kemudian dalam proses persidangan.
2. Manusia adalah makhluk sosial. Hal-hal seperti proses transaksi jual beli sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan alangkah baiknya





- Nasution., Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rasyid., Rohan, A *Hukum Acara Peradilan Agama Edis Baru* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Redi., Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* Jakarta: Sinar Grafika., 2017.
- Rosadi., Aden, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Saebani., Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Satrio., J. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Soekanto., Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Suparman., Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Wiradhama., Danny., dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik* Jakarta: Sagung Seto, 2011.
- Winarta., Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undanh-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- <http://paende.net/index.php/tentang-pengadilan/profil-instansi/> di akses tanggal 24 Juni 2018